

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA DALAM MENGATASI
PENYELUNDUPAN BARANG YANG MELANGGAR TATA
TERTIB DI KOTA BALIKPAPAN**

Danang Prabowo, Muhammad Zainal Arifin

**eJournal Administrasi Publik
Volume 9, Nomor 3, 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Efektivitas Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Dalam Mengatasi Penyelundupan Barang Yang Melanggar Tata Tertib di Kota Balikpapan

Pengarang : Danang Prabowo

NIM : 14020150881

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 17 Juni 2022

Pembimbing,



**Drs. H. M. Z. Arifin , M.Si
NIP 19570706 198203 1 025**

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	
Volume : 9	
Nomor : 3	
Tahun : 2022	
Halaman : 5572-5585	
Koordinator Program Studi Administrasi Publik Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003	

EFEKTIVITAS PENGAWASAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA DALAM MENGATASI PENYELUNDUPAN BARANG YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI KOTA BALIKPAPAN

Danang Prabowo ¹, M. Z. Arifin ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait Efektifitas Pengawasan Lembaga Masyarakat Kelas IIA dalam mengatasi Penyelundupan barang yang melanggar tata tertib di Kota Balikpapan serta mengetahui faktor-faktor penghambat Efektifitas Pengawasan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kota Balikpapan dalam mengatasi Penyelundupan barang-barang yang melanggar tata tertib. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Masyarakat Kelas II A Kota Balikpapan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dari data yang diperoleh, dianalisis menggunakan data model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Efektifitas Pengawasan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kota Balikpapan dalam mengatasi Penyelundupan barang-barang yang melanggar tata tertib belum terlaksana dengan maksimal. Saat ini dilakukan evaluasi dan menghasilkan beberapa usulan –usulan yang dikordinasikan seperti menambah sumber daya manusia di sektor penjaga, menambahkan beberapa alat penunjang pemeriksa yang lebih efektif dan apabila tidak memungkinkan untuk menambah penjaga dan alat-alat pemeriksa maka satu-satunya cara adalah berbenah dalam prosedur pemeriksaan pada pengunjung.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Lembaga Masyarakat

Pendahuluan

Indonesia, kini tergolong sebagai negara dalam tahap perkembangan. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam tahap

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Danangprab22@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

perkembangan mendorong Indonesia untuk membuat regulasi guna menghadapi laju globalisasi yang cepat. Salah satu ancaman yang signifikan terhadap populasi yang padat di Indonesia adalah meningkatnya kompleksitas masalah yang dihadapi, termasuk sulitnya mencari pekerjaan yang berdampak pada peningkatan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Penegakan hukum dan sistem keamanan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Aturan ini terwujud dalam bentuk Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), atau juga dikenal sebagai Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan (PROTAP). Namun, di Indonesia, pelaksanaan penegakan hukum dan sistem keamanan di Rutan dan Lapas belum sepenuhnya mematuhi standar yang telah diamanatkan oleh PLPP dan PROTAP. Salah satu contoh konkret dari ketidaksesuaian ini adalah jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah tahanan dan narapidana, serta fasilitas keamanan yang masih jauh dari standar yang ditetapkan. Selain itu, penjatuhan hukuman terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran juga tidak selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Faktor yang mendukung terjadinya penyelundupan ialah adanya kesenjangan antara jumlah sipir dan jumlah narapidana, terbukti berdasarkan hasil observasi penulis di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Balikpapan yaitu jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Balikpapan ialah sebanyak 1006 orang sedangkan jumlah petugas hanya 96 orang.

Ini juga disertai dengan kurangnya sarana dan peralatan keamanan, seperti senjata api, borgol, dan infrastruktur yang tidak mendukung sistem keamanan. Kekurangan dalam memenuhi standar keamanan ini dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran di Rutan dan Lapas.

Berdasarkan hasil observasi sementara yang telah saya lakukan terkait pelaksanaan penjagaan dan pengawasan di Lapas, saya merasa tertarik untuk lebih menyelidiki dan menganalisis permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait penyelundupan barang terlarang di dalam Lapas. Dari hasil data yang didapatkan dalam kurun waktu hanya 6 bulan penulis menemukan banyaknya ditemukan barang-barang yang melanggar tata tertib yang ditemukan saat razia berjumlah 170 barang razia dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan dan juga faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, jurnal ini menarik dua rumusan masalah

sekaligus menjadi tujuan utama mengenai efektivitas pengawasan lembaga permasyarakatan kelas IIA dalam mengatasi penyeludupan barang yang melanggar tata tertib di Kota Balikpapan, dan juga faktor yang menghambat lembaga permasyarakatan kelas IIA dalam mengatasi penyeludupan barang yang melanggar tata tertib Kota Balikpapan.

Kerangka Dasar Teori

Efektifitas

Menurut Bastian (dalam Tangkilisan, 2015:48) Efektivitas dapat dijelaskan sebagai keterkaitan antara hasil yang diperoleh dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan mempertimbangkan sejauh mana output, kebijakan, dan prosedur suatu organisasi mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas dapat dinilai melalui pencapaian hasil yang kemudian dibandingkan dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Definisi alternatif mengenai efektivitas yang diusulkan oleh Mahmudi (2019:92) menyatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara hasil yang diperoleh dan tujuan yang ingin dicapai. Semakin besar pengaruh atau sumbangan hasil terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut.

Dan juga Menurut Sumaryadi (2010:105) Efektivitas adalah sejauh mana suatu tindakan atau pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan harapan atau rencana. Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil yang dihasilkan cocok dengan yang diinginkan. Meskipun waktu, tenaga, dan faktor lainnya tidak diperhitungkan, jika suatu pekerjaan dilakukan dengan baik sesuai dengan rencana, maka dapat dianggap efektif. Para ahli percaya bahwa efektivitas adalah konsep krusial karena mencerminkan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan kata lain, ini mengukur sejauh mana aktivitas yang dilakukan mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ukuran Efektivitas

Mengukur keefektifan suatu organisasi bukanlah tugas yang mudah, karena hal ini melibatkan penilaian dari berbagai perspektif dan bergantung pada sudut pandang serta interpretasi masing-masing pihak. Adapun standar atau parameter untuk menilai apakah tujuan telah tercapai dengan efektif atau tidak, seperti yang dijelaskan oleh Siagian (2019:77), yaitu:

- a) Kepastian mengenai tujuan yang ingin dicapai sangat penting, karena hal ini membantu karyawan dalam menjalankan tugas mereka dengan fokus

pada pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, sehingga mencapai tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik.

- b) Kepastian mengenai strategi untuk mencapai tujuan sangat penting, karena strategi adalah rencana yang menunjukkan jalan yang harus ditempuh dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- c) Proses analisis dan pembuatan kebijakan yang kokoh, terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang telah disusun, yakni kebijakan harus memiliki kemampuan untuk menghubungkan tujuan-tujuan tersebut dengan upaya pelaksanaan operasional.
- d) Perencanaan yang cermat, pada dasarnya adalah tentang membuat keputusan sekarang mengenai aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi di masa mendatang.
- e) Penyusunan program yang sesuai adalah langkah penting setelah merancang rencana yang baik, karena tanpa program-program pelaksanaan yang tepat, pelaksanaan tugas akan kurang memiliki panduan yang jelas bagi para pelaksana.
- f) Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur kerja adalah salah satu penanda efektivitas organisasi, karena hal ini berkontribusi pada kemampuan bekerja secara efisien. Dengan adanya fasilitas dan infrastruktur yang tersedia, bahkan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien sangat penting. Tidak peduli sebagai apa pun suatu program, jika tidak dijalankan dengan efektif dan efisien, maka organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuannya. Karena melalui pelaksanaan yang baik, organisasi akan semakin mendekati pencapaian tujuannya.
- h) Dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi, diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat edukatif, mengingatkan manusia memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, organisasi memerlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian.

Selain itu, ada pula tiga pendekatan yang juga dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi seperti yang dikemukakan oleh Lubis dan Husain (2007:55):

- a) Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan yang menitikberatkan pada kesuksesan organisasi dalam memperoleh sumber daya, termasuk yang berupa aset fisik maupun aset non-fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- b) Pendekatan Proses (*process approach*) adalah untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan program, perlu menganalisis semua aktivitas dan proses internal yang ada dalam struktur organisasi.
- c) Pendekatan Sasaran (*goals approach*) dimana fokus pada hasil (output) adalah penekanan pada kemampuan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana sebagai ukuran keberhasilannya.

Manajemen Sumberdaya Manusia

Manusia merupakan sumber yang penting dalam berjalannya suatu organisasi atau perkumpulan, seperti yang disampaikan oleh para ahli, salah satunya yaitu Amstrong (dalam Sedarmayanti, 2013:350) yang berpendapat bahwa manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi, di samping itu efektivitas organisasi juga sangat ditentukan oleh manajemen manusia. Sedangkan manajemen sumber daya manusia itu sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan agar dapat tercapainya suatu keberhasilan di dalam organisasi, seperti yang disampaikan oleh Flippo (dalam Wati, 2013:8) bahwa manajemen sumber daya manusia melibatkan proses penarikan, seleksi, pembinaan, pemeliharaan, dan optimalisasi tenaga kerja untuk mencapai tujuan baik dalam tingkat individu maupun organisasi. Dalam sektor publik, birokrasi memiliki peran utama dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini dengan baik, mereka membutuhkan personel yang memiliki tingkat profesionalisme dan kompetensi yang tinggi.

Selain itu, Sedarmayanti (2013:349) juga mengungkapkan bahwa Manajemen sumber daya manusia di sektor publik berupaya untuk menggambarkan manusia sebagai elemen penuh potensi dalam visi pembangunan komprehensif dan menyeluruh bagi negara. Pendekatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia tersebut didasarkan pada empat prinsip dasar :

- 1) Sumber daya manusia merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh suatu organisasi, sementara manajemen yang efisien merupakan faktor kunci dalam mencapai kesuksesan organisasi tersebut.
- 2) Kesuksesan ini dapat tercapai dengan kemungkinan yang tinggi apabila peraturan, kebijakan, dan prosedur yang terkait dengan sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut terintegrasi dengan baik, berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, dan mendukung perencanaan strategis.
- 3) Kultur dan nilai-nilai organisasi, serta suasana yang muncul dari perilaku manajerial yang berasal dari budaya tersebut, memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian hasil terbaik. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan kultur tersebut, yang mungkin memerlukan perubahan

dan penguatan nilai-nilai organisasi. Hal ini harus diupayakan secara berkelanjutan, dimulai dari pimpinan, agar budaya tersebut dapat diterima dan diikuti dengan konsisten.

- 4) Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan mengintegrasikan semua anggota organisasi sehingga mereka terlibat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Pengawasan

Kadarisman (2013:171) berpendapat bahwa Pengawasan merupakan tugas yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan di berbagai unit atau departemen dalam manajemen fungsional. Tugas ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan atau tugas yang dilaksanakan oleh pegawai sesuai dengan tugas pokok mereka. Dengan kata lain, proses manajemen dianggap telah selesai jika pengawasan telah dilakukan. Oleh karena itu, setiap pimpinan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan atau kinerja individu sesuai dengan tugas pokok mereka. Agar fungsi pengawasan mencapai hasil yang diharapkan, maka pimpinan organisasi atau unit organisasi yang melaksanakan fungsi pengawasan harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan. Menurut Koontz dan O'Donnell yang dikutip oleh Sukarna (2011:112) yang menetapkan beberapa prinsip pengawasan sebagai berikut :

1. Prinsip Tercapainya Tujuan (*Principle of assurance of objective*)
2. Prinsip Efisiensi Pengawasan (*Principle of efficiency of control*)
3. Prinsip Tanggung Jawab Pengawasan (*Principle of control responsibility*)
4. Prinsip Pengawasan Masa Depan (*Principle of future control*)
5. Prinsip Pengawasan Langsung (*Principle of direct control*)
6. Prinsip Refleksi Perencanaan (*Principle of reflection of plan*)
7. Prinsip Penyesuaian dengan Organisasi (*Principle of organizational suitability*)
8. Asas Wewenang Individual (*Principle of individuality of control*)
9. Prinsip Standar (*Principle of standard*)
10. Prinsip Pengawasan Terhadap Strategis (*Principle of strategic control*)
11. Prinsip Kekecualian (*The exception Principle*)
12. Prinsip Pengawasan Fleksibel (*Principle of flexibility of control*)
13. Prinsip Peninjauan Kembali (*Principle of review*)
14. Prinsip Tindakan (*Principle of action*)

Indikator Pencegahan Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan

Melalui instruksi Menteri, seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memiliki Indikator Pencegahan Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan yang diatur dalam bentuk Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2015 (Bab II pasal 8) tentang Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan. Indikator yang dimaksud adalah penjagaan, kontrol, dan penggeledahan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah entitas yang beroperasi di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebelumnya di bawah Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dapat terdiri dari narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), termasuk juga yang masih berstatus tahanan, yang berarti mereka masih dalam proses hukum dan belum mendapatkan keputusan bersalah atau tidak bersalah dari pengadilan.

Aparat di Lembaga Pemasyarakatan adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bekerja di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas dan kewenangan mereka diatur dalam Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor M/HH/16/KP/05/02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Definisi Konseptual

Efektivitas pengawasan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam mengatasi penyelundupan adalah serangkaian kegiatan pengawasan terstruktur yang dilakukan oleh aparat lembaga pemasyarakatan dalam bentuk pemeriksaan kepada setiap pengunjung dan pemeriksaan terhadap petugas sipir yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, yang mana pengawasan ini tetap mengacu pada peraturan pemerintah yang diberlakukan agar meminimalisir bahkan menghilangkan pelanggaran-pelanggaran yang sebelumnya pernah terjadi khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, sesuai dengan uraian yang disampaikan oleh Sugiyono (2014:15) penelitian deskriptif merupakan Pengukuran yang akurat terhadap fenomena sosial khusus. Penelitian deskriptif adalah studi yang bertujuan untuk menyajikan gambaran tentang keadaan, sifat, atau karakteristik dari suatu fenomena atau objek penelitian. Tujuannya adalah hanya untuk menggambarkan dengan seakurat mungkin variabel, gejala, atau

keadaan tertentu. Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memberikan gambaran yang jelas, menceritakan, dan menafsirkan data yang ada. Contohnya, mengenai situasi yang tengah terjadi, hubungan antar elemen, kegiatan tertentu, pandangan, sikap yang tampak, atau proses yang sedang berjalan.

Melalui penelitian ini, peneliti akan memberikan penjelasan mengenai Efektivitas Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan. Adapun yang menjadi fokus mengenai efektivitas pengawasan penyelundupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan meliputi penjagaan pengeledahan, dan kontrol. Faktor-faktor penghambat efektivitas pengawasan penyelundupan barang terlarang di Lapas. Data primer di dalam penelitian dan juga sebagai key informant dalam penelitian ini yaitu Kepala Lapas Kelas IIA Kota Balikpapan & Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Data sekunder melibatkan bahan-bahan seperti dokumen, arsip, surat-surat, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai panduan dalam penelitian untuk membaca dan mempelajari hal yang berkaitan. Adapun data tersebut nantinya akan menggunakan analisa dari Miles dan Huberman (2007:15-20) yang akan melalui empat komponen yaitu berupa pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lapas

Hasil dari penelitian penulis mengenai Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lapas yaitu, saat ini Lapas Kelas II A Balikpapan mengalami *overcapacity* dimana Lapas yang hanya berdaya tampung 350 orang namun kini dihuni hingga 1.009 narapidana. Sehingga dalam mengurangi efektivitas pengawasan Lapas di dalam mengatasi penyelundupan barang terlarang. Penelitian akan difokuskan pada standar penjagaan, kontrol, dan pengeledahan. Secara terperinci, penulis akan menguraikan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan di Lapas dalam menangani penyelundupan barang terlarang. Informasi dan data yang diperoleh melalui penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Penjagaan

Mengenai Penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33

Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan sebagaimana dijelaskan yang dijelaskan dalam peraturan ini bahwa Para Sipir harus berjaga di titik-titik yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku khususnya jumlah sipir yang ditugaskan untuk berjaga juga harus sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan telah menjalankan aturan sesuai dengan undang-undang yang ada.

Berdasarkan data-data yang telah didapatkan, bahwa tidak semua tempat dijaga oleh sipir, itu disebabkan oleh terbatasnya jumlah personel yang ada. Untuk itu Kepala LAPAS melakukan pemasangan CCTV di area area yang jauh dari pengawasan petugas, guna mengantisipasi apabila ada penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam tahanan. Meski penjagaan yang dilakukan oleh Penjaga Lapas sudah sesuai prosedur, namun karena terbatasnya personel dan alat pemantau dijadikan oleh penghuni Lapas sebagai celah untuk menyelundupkan barang-barang terlarang sehingga dapat masuk ke sel tahanan. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh Penjaga Lapas sudah sesuai prosedur, namun karena terbatasnya personel dan alat pemantau dijadikan oleh penghuni Lapas sebagai celah untuk menyelundupkan barang-barang terlarang sehingga dapat masuk ke sel tahanan.

2. Penggeledahan

Menurut pendapat Ahadi (2010:3) yaitu Sebuah organisasi mungkin dapat mengoperasikan dirinya dengan efisien, namun belum tentu efektif dalam mencapai tujuan organisasinya. Semakin mendekati pencapaian tujuan organisasi, semakin efektif kinerja organisasi tersebut. Penggeledahan merupakan tahap lanjutan dari kegiatan penjagaan, yang mana apabila ada pengunjung yang akan masuk ke area dalam Lapas maka akan dilakukan penggeledahan di pintu masuk dan selanjutnya pengunjung yang ketahuan membawa benda terlarang akan diberikan teguran dan barang-barang terlarangnya akan disita oleh penjaga Lapas.

Dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam kegiatan penggeledahan yang dikerjakan oleh petugas bukan hanya ditujukan kepada penghuni Lapas saja, namun juga berlaku kepada setiap pengunjung yang datang untuk membesuk keluarganya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini pihak Lapas menggunakan alat alat yang membantu dalam menggeledah barang-barang bawaan para pengunjung. Selain itu pihak Lapas Kelas II A Balikpapan menempatkan banyak sipir yang bertugas di ruang

pengeledahan guna mempercepat proses pengeledahan bagi tamu atau narapidana yang masuk ke dalam Lapas. Selain itu, hanya makanan yang boleh diberikan oleh pengunjung kepada penghuni Lapas yang mana sebelumnya makanan tersebut juga sudah melalui proses pemeriksaan. Meskipun kegiatan pengeledahan ini sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Hanya saja masih perlu adanya pembaruan guna memperkuat larangan untuk memasukkan barang-barang lain yang dibawa oleh pengunjung untuk diberikan kepada keluarga mereka selaku penghuni Lapas.

3. Kontrol

Siagian (2008:112) menyatakan Pengawasan atau kontrol adalah tindakan memantau secara cermat pelaksanaan segala aktivitas di dalam suatu organisasi, dengan tujuan memastikan bahwa semua tugas yang tengah dilakukan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari teori di atas jika dikaitkan dengan pembahasan dalam penelitian ini mengenai aturan yang dijalankan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan dalam hal pengontrolan berupa razia terhadap para napi yang tidak mematuhi tata tertib Lapas. Dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan telah menjalankan aturan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pasal 1 ayat (15) yang mengatakan bahwa kontrol adalah Menyusun dan melaksanakan serangkaian langkah pemeriksaan dan pengawasan cermat terhadap tujuan dari pelaksanaan tugas pengamanan..

Dalam rangka mengatasi banyaknya barang yang berhasil diseludupkan oleh narapidana, pihak Lapas rutin menggelar razia untuk memberikan efek jera pada para narapidana. Kontrol kepada para narapidana berupa razia. Razia tersebut terbagi menjadi 2 jenis yang pertama razia rutinyang biasanya dilaksanakan 1-2 kali dalam sebulan serta razia mendadak apabila mendapat informasi bahwa ada penyelundupan narkoba dan barang-barang lainnya yang dilakukan oleh para narapidana. Untuk razia mendadak sendiri, pihak Lapas tidak melakukan razia ke semua tempat namun hanyadi sel yang dicurigai saja. Selain itu juga seringnya ada pembocoran informasi mengenai razia mendadak yang dilakukan oleh oknum penjaga Lapas juga membuat razia mendadak yang dilakukan sering kali berbuah nihil. Para petugas tidak mampu menemukan barang bukti yang dimaksud karena para napi telah memindahkan barang tersebut.

Dalam melakukan kontrol atau razia, pihak Lapas masih sering dihambat dengan adanya sipir yang membocorkan informasi mengenai razia kepada para narapidana. Untuk razia dadakan pihak Lapas mengantisipasi sipir yang membocorkan informasi razia dengan memberikan informasi palsu kepada para sipir, jadi saat dilakukannya razia dadakan yang dipimpin oleh kepala Lapas atau kepala KPLP narapidana tidak sempat memindahkan barangnya ke kamar lain yang tidak terkena razia. Sedangkan untuk razia yang digelar secara rutin, sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja tidak terlalu efektif disebabkan karena terbatasnya sipir yang ditugaskan. Dengan telah dilakukannya razia masih banyak barang-barang terlarang yang berhasil diselundupkan oleh narapidana, Oleh karena pihak Lapas rutin menggelar razia dua kali dalam sebulan.

Faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan Penyelundupan Barang Terlarang Di Lapas

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa selama proses pengawasan penyelundupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan ada dua faktor penghambat yaitu:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan pengawasan tidak bisa maksimal dikarenakan jumlah sipir dan narapidana yang tidak seimbang sehingga tidak semua area bisa terpantau oleh petugas ditambah lagi masih banyaknya sipir yang belum mendapatkan pelatihan maksimal dari pusat karena keterbatasan anggaran, padahal pelatihan itu berguna agar sipir bisa menghadapi berbagai situasi yang ada.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung sehingga pada kondisi tertentu bisa menjadi celah bagi para pengunjung dan narapidana tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelundupan barang-barang yang melanggar tata tertib.

Dalam Pengawasan Penyelundupan yang diupayakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan masih banyaknya kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh pihak Lapas mulai dari sumber daya manusia yang tidak mencukupi dan juga kurang pelatihan yang menyebabkan beberapa sipir kurang keterampilan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti saat terjadi pemadaman listrik seharusnya petugas sipir bisa menjalankan tugas dengan teliti dan cepat meskipun tanpa bantuan alat x ray maupun pendeteksi logam kemudian kurangnya sarana dan prasarana yang memadai akibat keterbatasan anggaran menyebabkan lambannya proses pengeledahan karena jumlah pengunjung yang lumayan banyak kemudian dengan mesin diesel berdaya rendah juga sangat mengkhawatirkan apabila

terjadi pemadaman listrik karena para petugas harus menggeledah para pengunjung satu persatu secara manual dan itu bisa memakan waktu yang cukup lama sehingga pengawasan penyelundupan tidak berjalan dengan maksimal.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan penulis tentang Efektivitas Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan dalam mengatasi penyelundupan dan dihubungkan dengan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun tetap saja masih belum efektif dikarenakan tidak sebandingnya jumlah antara sipir dan narapidana, selain itu pengeledahan yang dilakukan pada para pengunjung Lapas beberapa terbukti membawa benda-benda yang melanggar tata tertib Lapas, oleh karena itu barang tersebut disita oleh pihak Lapas kemudian pihak Lapas akan memberikan teguran dan juga larangan untuk membesuk narapidana yang bersangkutan. Adapun kontrol yang rutin dilakukan oleh pihak lembaga juga sudah efektif dan juga telah memberikan efek jera pada narapidana. Namun ada beberapa faktor yang menghambat efektivitas tersebut yaitu kurangnya tenaga sipir yang tidak sebanding dengan narapidana, sehingga kontrol yang dilaksanakan kurang terlaksana secara maksimal. Selain itu, sarana dan prasarana yang kurang memadai juga mempengaruhi efektivitas pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan dalam mengatasi penyelundupan.

Saran

Berdasarkan analisa dan juga temuan-temuan berkaitan dengan Efektivitas Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan dalam mengatasi Penyelundupan, maka penulis perlu mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Dari temuan di lapangan mengenai Penjagaan di Lapas masih belum efektif diharapkan untuk mengatasi keterbatasan pihak Lapas sebaiknya menambah jumlah sipir guna meningkatkan pengawasan untuk menekan kecurangan-kecurangan di dalam Lapas yang dilakukan oleh narapidana maupun sipir.

2. Berdasarkan hasil penelitian pada pengeledahan, pengeledahan yang dilakukan oleh pihak Lapas sudah sangat baik tapi diharapkan pihak Lapas agar menghimbau dan mengedukasi para sipir dan juga para pengunjung mengenai betapa bahayanya menyelundupkan barang yang melanggar tata tertib ke dalam Lapas karena bisa menyebabkan keamanan di dalam Lapas menjadi tidak stabil, kemudian sebaiknya pihak Lapas sebaiknya segera mengganti alat-alat yang sudah cukup tua dan mulai bermasalah agar pengeledahan bisa lebih teliti dan cepat.
3. Kontrol yang dilakukan pihak Lapas sudah tepat sasaran tapi yang disayangkan adalah masih sering terjadi kebocoran informasi razia dadakan yang justru dimanfaatkan dengan baik oleh para narapidana yang menyelundupkan barang oleh karena itu diharapkan bagi petugas sipir yang membocorkan informasi untuk diberi sanksi sesuai dengan sanksi yang berlaku yaitu dimulai sanksi ringan yaitu dengan memberikan teguran kemudian sanksi menengah yaitu penurunan pangkat dan yang terakhir sanksi yang paling berat yaitu pemecatan.

Daftar Pustaka

- Ahadi, Nopri. 2014, *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press
- Flippo, Edwin B. 2013. *Personel Management (Manajemen Personalia)*. Jakarta: Erlangga
- Lubis, Hari dan Martani Huseini. 2007. *Efektivitas Pelayanan Publik*. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sedarmayanti. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2015. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.